

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat di manapun kita berada, dapat dipastikan adanya permasalahan-permasalahan serta penyimpangan sosial yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun sekumpulan masyarakat. Hal yang demikian tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, karena manusia di dunia ini pasti akan mempunyai masalah sosial. Hubungan atau interaksi yang terjadi dalam anggota masyarakat tidak jarang menimbulkan atau mengakibatkan permasalahan-permasalahan atau penyimpangan norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Hubungan atau interaksi manusia tidak terbatas interaksi dengan sesamanya tetapi juga bisa dengan lingkungan. Dari interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, agama, hukum, atau sebuah kondisi negara dimana masyarakat itu bernaung, seperti kondisi keamanan, kondisi politik, dan sebagainya. Masalah yang senantiasa menyertai kehidupan umat manusia sepanjang sejarahnya sebagaimana masalah sosial, ekonomi, dan politik (Suprayogo & Tobroni, 2003:17).

Dari permasalahan-permasalahan atau penyimpangan sosial yang banyak terjadi dan menjadi penyakit masyarakat salah satunya adalah

prostitusi (pelacuran). Pelacuran merupakan masalah sosial tertua yang dikenal masyarakat, dan erat sekali kaitannya dengan masalah kemiskinan. Pelacuran dipandang sebagai gejala patologis karena melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengindahkan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Membicarakan prostitusi dan pelacuran dalam kehidupan masyarakat merupakan hal biasa, dari yang remaja maupun sampai yang sudah tua. Membahas prostitusi itu berarti tidak lepas dari seks dan wanita. Seks adalah kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia yang sudah dewasa yang bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa manusia yang cinta akan keindahan secara fisik atau kasat mata. Dari keindahan itulah bisa disimpulkan bahwa wanita adalah simbol keindahan itu sendiri. Maka fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat bahwa seks selalu identik dengan wanita, karena seks tidak bisa lepas dari wanita.

Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.(C.L.Rudolph-Mardjono Reksodiputro,1968)

Sebab-sebab terjadinya pelacuran haruslah dilihat pada fakto-faktor endogen dan eksogen. Di antara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Di antara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa.

Usaha untuk mencegah pelacuran ialah dengan jalan meneliti gejala-gejala yang terjadi jauh sebelum adanya gangguan-gangguan mental, misalnya gejala insekuritas pada anak-anak wanita, gejala membolos, mencuri kecil-kecilan dan sebagainya. Hal itu semuanya dapat dicegah dengan usaha pembinaan sekuritas dan kasih sayang yang stabil.

Jika membahas tentang permasalahan prostitusi dan pelacuran pandangan utama masyarakat tentu tertuju pada sebuah tempat lokalisasi yang memang tempat tersebut dibangun dan dikelola sedemikian rupa untuk menampung para Wanita Tuna Susila (WTS) agar mereka tidak berkeliaran dalam kehidupan masyarakat luas serta memudahkan pemerintah sekitar untuk memantau, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap WTS. Selain itu keberadaan pelacuran di masyarakat dinilai telah mengganggu perkembangannya khususnya bagi generasi muda.

Pelacuran memang sulit dihapus kecuali mengurangi, menekan dan membatasi pertumbuhan dan penyebarannya. Masalah sosial yang satu ini merupakan masalah yang akan tetap ada, sukar, bahkan hampir tidak mungkin hilang dari kehidupan masyarakat selama masih ada nafsu seks yang lepas kendali, kemauan dan hati nurani. Kondisi demikian mendorong pemerintah untuk mendirikan lokalisasi prostitusi atau kompleks pelacuran. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya melokalisir perkembangan dan pertumbuhan praktek pelacuran, dengan membentuk proyek lokalisasi/rehabilitasi sosial WTS, termasuk diantaranya lokalisasi Kedung Banteng yang bertempat di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, salah satu pertimbangan penetapan lokalisasi umumnya adalah lokasi tersebut berada di daerah terpencil dan jauh dari pemukiman warga.

Mengikuti instruksi gubernur jawa timur nomer 460/15612/031/2011 tertanggal 20 oktober 2011 tentang permohonan dukungan kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung program pemerintah tentang penutupan lokalisasi di seluruh wilayah provinsi jawa timur, serta melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan

social, serta demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh norma-norma agama di Jawa Timur, maka diperlukan kebijakan strategis berupa pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan woman trafficking secara terpadu dan menyeluruh. Nampaknya lokalisasi di wilayah ponorogo juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk segera merealisasikan penutupan tempat prostitusi.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Kebijakan menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (policy is whatever governments choose to do r not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika sebuah kebijakan berisi

nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, maka sebuah kebijakan akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat penerima kebijakan tersebut.

Namun nampaknya kebijakan tersebut hingga sekarang masih tarik ulur karena mendapatkan banyak tentangan, walaupun tidak sedikit pula yang sejalan dengan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik, banyak kebijakan menghadapi tantangan dan masalah dalam implementasinya. Seperti halnya warga sekitar lokalisasi Kedung Banteng, khususnya para penghuni wisma lokalisasi yang saat ini gencar menolak rencana kebijakan Pemkab Ponorogo yang akan menutup “ mata pencaharian “ mereka. Mereka menganggap, penutupan akan berdampak luas bagi warga sekitar yang menggantungkan kehidupan ekonomi dari lokalisasi di kawasan itu. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tentangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi

organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, judul yang di ambil dalam penelitian ini adalah “ ANALISIS ISU KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR (studi Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo) “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak sosial ekonomi yang akan terjadi jika penutupan lokalisasi Kedung Banteng terealisasi bagi para WTS, Pemilik Wisma, dan Masyarakat sekitar?
2. Seberapa besar upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upayanya mewujudkan kebijakan penutupan Lokalisasi Kedung Banteng ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi bagi WTS, Pemilik Wisma dan Warga sekitar
2. Untuk mengetahui seberapa besar upaya kebijakan pemerintah daerah dalam penutupan lokalisasi di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan berguna sebagai bahan perbandingan sebagai referensi literatur bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.
- b) Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah prostitusi dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti.

Sebagai bahan masukan, perbandingan dan penerapan ilmu Kebijakan Publik yang diperoleh di bangku kuliah, dalam konteks kenyataan yang ada dimasyarakat, khususnya mengenai kehidupan WTS
- b. Bagi masyarakat umum.

Diharapkan mampu memberikan pengertian yang konkret tentang sebab-akibat dari pengambilan sebuah kebijakan, hingga upaya penanganan penerima kebijakan tersebut.
- c. Bagi Dinas Terkait.

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi salah satu bahan pemikiran dalam menyusun kebijakan program penanganan Lokalisasi.

E. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Setiap hal di dunia pasti ada tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama demi mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Ada beberapa pendapat tentang definisi kebijakan publik. Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Ealau dan Keneth Prewit yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).

Kemudian Richard Rose (1969) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan suatu arah atau pola

kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengimbangi beberapa definisi kebijakan, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Pada dasarnya Kebijakan Publik selalu mengandung multi-tujuan, yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama.

Dalam pembentukannya, sebuah kebijakan akan memiliki sebuah kerangka kerja yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut, AG Subarsono dalam Suharno (2013):

1. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuaan kebijakan.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
4. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.
5. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.

2. Analisa Kebijakan

Analisa berasal dari kata Yunani yang berarti memecah menjadi bagian-bagian. Analisa kebijakan bermula ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan masalah publik (Dunn). E.S. Quade mengemukakan bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru.

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah- masalah kebijakan (William N Dunn)

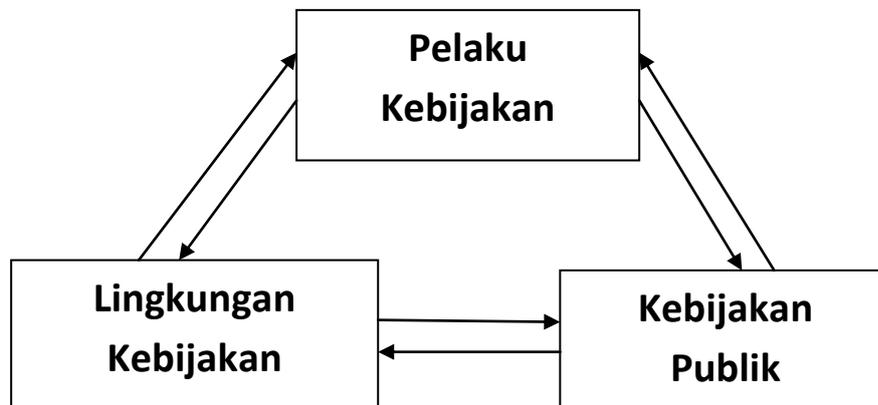
Weimer-Vinning mengemukakan bahwa kerangka konseptual analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi kebijakan-dikaitkan dengan melakukan perhitungan cost benefit dari kebijakan. Keduanya mengangkat pendekatan model “rasionalis” dalam analisis kebijakan yang mempunyai bagian-bagian berikut :

1. Mendefinisikan masalah (define problem)
2. Menetapkan kriteria evaluasi (establish evaluation criteria)

3. Memaparkan alternati-alternatif dan memilih salah satu (display alternatives and select among them)
4. Mengidentifikasi alternatif kebijakan (identify alternative policy)
5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan (monitor and evaluate policy outcomes)

Pada waktu prosesnya, secara paralel dilakukan pekerjaan pengumpulan informasi yang disebut sebagai *identifying and organizing relevant data, theories, and facts for assessing problem and predicting consequences of current and alternative policies*. Pengumpulan informasi memberikan kontribusi baik pada analisis permasalahan maupun analisis solusi.

Dunn (1992) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan untuk menggantikan politik dan membangun elit teknokratis. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang menurut Dunn, dengan mengutip Thomas R. Dye, dapat di visualisasikan sebagai berikut :



Gambar I. 1

Budi Winarno (2005), berpendapat bahwa analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan dapat dicermati pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Thomas R. Dye berpendapat analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan publik.

Jadi, analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Artinya, pengembangan teori analisis kebijakan di masa mendatang akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi di lingkungan administrasi publik. Ranah keberhasilan-kegagalan

analisis kebijakan berkaitan langsung dengan produk *final*-nya, yaitu setelah menjadi kebijakan publik.

3. Isu Kebijakan

Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu, (William N.Dunn). Hal ini terjadi barangkali ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses pembuatan kebijakan publik apapun pada umumnya berawal dari adanya kesadaran akan adanya masalah tertentu. Di sisi lain Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gunn dalam Suharno (2013) menyatakan isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atas ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan. Dengan pemahaman seperti itu maka menurut Alford dan Friedland dalam Solichin Abdul Wahab (2004) isu dapat merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (*alternative policies*), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran untuk kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka.

Dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa timbulnya isu kebijakan terutama karena telah terjadi konflik atau perbedaan pandangan

di antara para aktor atas suatu situasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Ackoff, dalam William Dunn, dalam Budi Winarno (2012) isu dalam hal ini isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri.

Menurut Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn dalam Suharno (2013) suatu isu dapat menjadi sebuah agenda kebijakan apabila memiliki kriteria, antara lain :

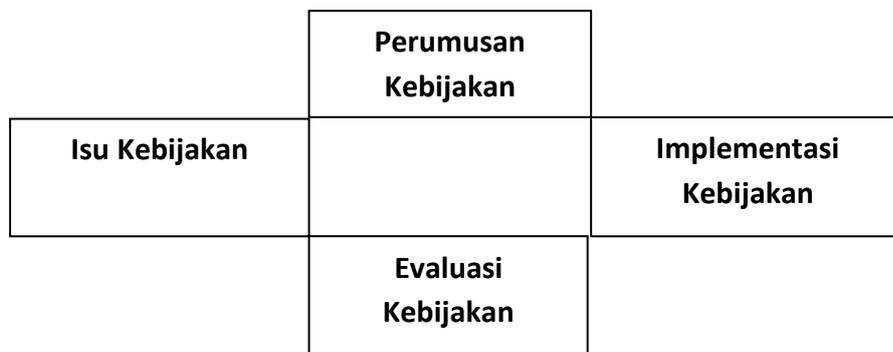
1. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga isu tersebut praktis tidak lagi diabaikan begitu saja, atau isu tersebut telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang apabila segera diatasi justru akan menimbulkan luapan kritis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
2. Isu tersebut telah menjadi partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada

umumnya, dan mendapatkan dukungan berupa liputan media massa yang luas.

4. Isu tersebut menjangkau dampak yang luas.
5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan namun mudah dirasakan kehadirannya.

Kredibilitas dan makna ilmiah dari kriteria tersebut di atas cukup tinggi, namun hal tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai resep siap pakai, melainkan sekadar sebagai semacam kerangka acuan.

Pemahaman dasar proses kebijakan dalam konteks isu kebijakan :



Gambar I. 2

Gambar tersebut dapat menjelaskan sebuah isu kebijakan dalam sekuensi berikut :

- a) Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan

keselamatan bersama, berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan.

- b) Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
- c) Setelah dirumuskan, isu yang menjadi sebuah kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d) Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- e) Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

4. Prostitusi

Prostitusi adalah merupakan bagian dari patologi sosial. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin dan hokum formal (Kartini Kartono). Lokalisasi prostitusi legal membuka ruang dan

kesempatan terjadinya penyimpangan tingkah laku, norma, solidaritas hidup kekeluargaan dan hukum formal.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya. Tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. (Kartini Kartono 2005). Definisi prostitusi sendiri berasal dari bahasa latin pro stituere yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedangkan pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Tuna Susila (WTS) adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan penyakit. Baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.

Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan perzinaan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh. Sehingga prostitusi bersifat negative dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat.

5. Definisi Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: “Masyarakat adalah suatu releksi dari manusia perorangan, suatu masyarakat akan mengalami

kegoncangan sebagaimana halnya manusia, perorangan yang tergantung keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: unsur nafsu, unsur semangat dan unsur intelegensi (Soekanto, 1988:41).

Usaha mengembangkan masyarakat ternyata tidak menghasilkan suatu rumusan yang seragam. Maka dalam usaha menyamakan pandangan tentang masyarakat ini yang paling penting adalah harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Manusia hidup bersama.
- b) Bersama-sama untuk waktu yang cukup lama.
- c) Menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d) Mematuhi terhadap norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama.
- e) Menyadari bahwa mereka bersama-sama di ikat oleh perasaan diantara para anggota yang dengan lainnya.
- f) Menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. (Wahyu MS, hlm.61)

5. Definisi Sosial dan Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu

masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan)(KBBI,1996:251).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981:35).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penggunaan metode penelitian sangatlah penting, karena dengan menggunakan metode penelitian, kita dapat memperoleh data sesuai dengan obyek yang kita teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar, tepat dan akurat, sehingga tujuan penelitian bisa tercapai. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Sedangkan David Williams (1995) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kedung Banteng, khususnya di lingkungan lokasi Kedung Banteng, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah, peneliti ingin mengetahui tentang tanggapan masyarakat sekitar lokasi terkait rencana penutupan lokasi Kedung Banteng, serta menganalisa dampak dari rencana kebijakan penutupan lokasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dampak sosial ekonomi yang terjadi terkait rencana kebijakan penutupan lokasi Kedung Banteng, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo oleh pemerintah. Adapun sumber data langsung penulis dapatkan yaitu pendamping lokasi atau koordinator dari pihak Dinas Sosial, Kepala Dinsosnakertrans, tokoh masyarakat di sekitar sekaligus

dari para WTS di lokasi Kedung Banteng, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data ini dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maksud mengadakan wawancara juga ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa datang, memverifikasi,

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.

b. Observasi

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek; menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada waktu itu (Guba & Lincoln, 1981); pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumen dan record diperlukan karena merupakan keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln (1981:235), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti berikut :

- a) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

- c) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d) Record tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

6. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hadari Nawawi (1987 : 62) menyatakan bahwa : ” penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak”. Penelitian deskriptif dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala yang standar dan menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan.

Analisis data secara kualitatif berwujud apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan jalan membandingkan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian dengan landasan teori yang dikemukakan.

Analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 3 komponen yaitu sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang saling berkaitan.

a. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini

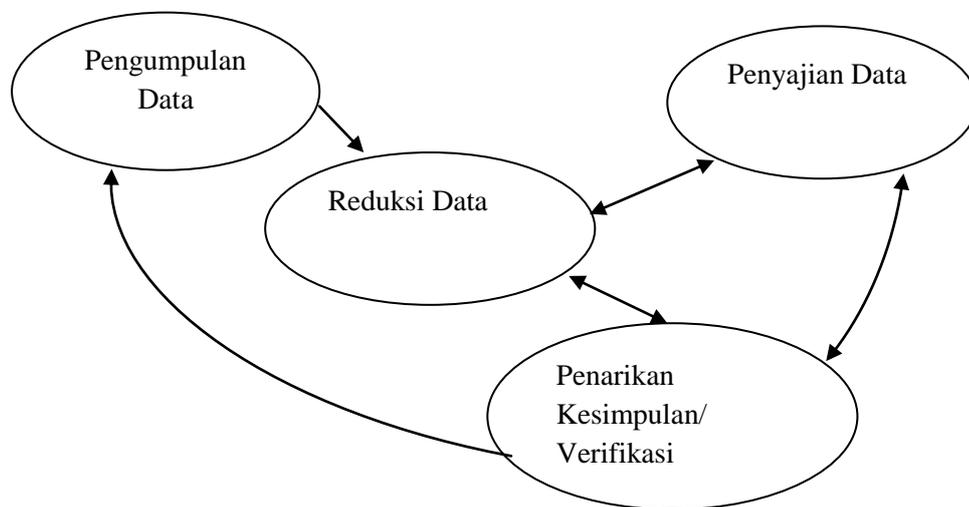
berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan (meski mungkin tidak didasari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus,, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Reduksi data dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa.

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bias dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar catatan lapangan.

Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi atau saling memeriksa antar teman (terutama bila

penelitian dilakukan secara kelompok) untuk mengembangkan apa yang disebut konsesus antar subjektif. Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.



Gambar I.3 Komponen-komponen analisis data model interaktif
(Miles dan Huberman dalam Tjetjep Rohendi, 1992: 16-20)

Dengan memperhatikan gambar diatas, maka proses dapat dilihat pada waktu pengumpul data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dari bagian-bagian tersebut, peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwanya yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti

penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan penelitian supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya.

Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga pendalaman. Dalam keadaan ini, tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus. Biasanya sebelum peneliti mengakhiri proses penyusunan penelitian, kegiatan pendalaman data ke lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil penelitian.